



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 5328-5341

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung (Studi Kasus: Kelurahan Pasirlayung)

Wiji Astuti<sup>1✉</sup>, Indriyati Kamil<sup>2</sup>

Universitas Langlangbuana, Indonesia

Email: [wijiaastuti12345@gmail.com](mailto:wijiaastuti12345@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Latar belakang penelitian ini adalah adanya masalah tumpukan sampah di jalan-jalan wilayah Kelurahan Pasirlayung yaitu Jalan Padasuka dan Cimuncang pada pagi hari yang membuatnya terpapar pada Laporan tingkat Kota yang disorot dalam laporan protokol pimpinan Kota Bandung sebagai isu sentimen negatif yang harus segera diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung (Studi Kasus: Kelurahan Pasirlayung). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif, metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teori konsep Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang meliputi aspek Standar dan sasaran Kebijakan, Sumber Daya Kebijakan, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Komunikasi antar Organisasi terkait implementasi, Disposisi Pelaksana dan Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Pasirlayung Standar dan tujuan kebijakan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandung No. 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah yang tujuannya agar setiap masyarakat mematuhi kebijakan pengelolaan sampah agar mulai meminimalisir volume sampahnya dari rumah, disepakati bahwa keberhasilan kebijakan ini adalah berkurangnya sampah sisa yang dibuang di TPS, kemudian dari aspek sumber daya kebijakan, dari segi sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas sudah mencukupi, sedangkan dari segi anggaran masih minim, dari aspek karakteristik pelaksana ada pasang surut kinerja dan beberapa kesulitan kemudian aspek komunikasi antar organisasi terkait kegiatan implementasi pada lingkup internal sudah cukup baik, namun pada lingkup eksternal perlu ditingkatkan dari aspek Disposisi/Sikap Pelaksana tingkat intensitas respon

penerimaan, namun tingkat intensitas respon masih cukup rendah karena yang sudah bergabung menjadi nasabah bank sampah masih sedikit dan ditimbang setiap ada jadwal, dari segi kondisi politik, sosial, ekonomi mendukung kebijakan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan belum berjalan secara optimal dengan adanya faktor pendukung dan penghambat kebijakan. Penelitian ini memberikan saran untuk meningkatkan komunikasi antar organisasi pelaksana dalam hal ini DLHK Kota Bandung untuk pemetaan pemangku kepentingan dan juga perlunya rencana aksi bersama dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Pasirlayung yang melibatkan seluruh elemen masyarakat daerah.

Kata kunci: *Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Sampah.*

#### Abstract

The background of this study is the problem of piles of garbage on the streets of Pasirlayung Village, namely Jalan Padasuka and Cimuncang in the morning which makes it exposed to the City-level Report highlighted in the protocol report of the Bandung City leadership as a negative sentiment issue that must be resolved immediately. This study aims to describe and analyze the Implementation of Waste Management Policy in Bandung City (Case Study: Pasirlayung Village). The research method used is descriptive research through a qualitative approach, a research method based on the philosophy of positivism and used to examine the condition of natural objects. Data collection techniques use observation, interviews and documentation using the concept theory of Policy Implementation from Van Meter and Van Horn which includes aspects of Policy Standards and targets, Policy Resources, Characteristics of Implementing Organizations, Communication between Organizations related to implementation, Implementer Disposition and Social, Political and Economic Conditions. The results of the study indicate that the Implementation of Waste Management Policy in Pasirlayung Village Standards and policy objectives refer to Bandung City Regional Regulation No. 9 of 2018 concerning Waste Management, the purpose of which is for every community to comply with the waste management policy in order to start minimizing the volume of their waste from home, it was agreed that the success of this policy is the reduction in residual waste disposed of at TPS, then from the aspect of policy resources, in terms of human resources and facility resources are sufficient, while in terms of budget it is still minimal, from the aspect of the characteristics of the implementers there are ups and downs in performance and some difficulties then the aspect of communication between organizations related to implementation activities in the internal scope is quite good, but in the external scope it needs to be improved from the aspect of Disposition/Attitude of the Implementer, the level of intensity of the response to acceptance, but the level of intensity of the response is still quite low because those who have joined as waste bank customers are still few and are weighed every time there is a schedule, in terms of political, social, economic conditions support the policy. The conclusion

of this study shows that the Implementation of the Policy has not run optimally with the existence of supporting and inhibiting factors for the policy. This study provides suggestions for improving communication between implementing organizations in this case the Bandung City DLHK for stakeholder mapping and also the need for a joint action plan in waste management in Pasirlayung Village involving all elements of the local community.

*Keywords: Policy, Implementation, Waste Management.*

## PENDAHULUAN

Kota Bandung sebagai salah satu daerah otonom, memiliki berbagai macam potensi seperti pariwisata, pendidikan, dan perdagangan. Besarnya potensi yang dimiliki Kota Bandung menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang untuk datang dan mengadu nasib. Dampaknya setiap tahun Kota Bandung mengalami kenaikan penduduk (Firdayanti & Oktafani, 2023). Data yang diperoleh berdasarkan hasil sensus, tahun 2021 menunjukkan penduduk Kota Bandung sebanyak 2.452.943 jiwa, pada tahun 2022 sebanyak 2.461.553 jiwa, kemudian naik menjadi 2.469.589 jiwa pada tahun 2023.

Semakin bertambahnya jumlah penduduk secara umum akan menyebabkan bertambahnya volume sampah, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Hal tersebut diakibatkan dari aktivitas dan konsumsi serta gaya hidup masyarakat itu sendiri. Sampah yang ditimbulkan dari aktivitas dan konsumsi masyarakat telah menjadi permasalahan lingkungan yang harus ditangani oleh pemerintah Kota Bandung (Kamil, 2018). Apabila tidak dikelola dengan baik, maka sampah akan memengaruhi estetika, kebersihan, dan kenyamanan kota. Selain itu, dapat juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan kota akibat dari produksi dan polusi sampah (Adi et al., 2022).

Darurat sampah di Kota Bandung terjadi akibat dari terbakarnya Tempat Pengelolaan Sampah TPA Sarimukti di bulan Agustus 2023, yang merupakan satu-satunya TPA aktif dalam menyimpan sampah di Kota Bandung (Mardwita et al., 2019). Pemerintah Daerah Kota Bandung telah melakukan berbagai upaya dalam penanganan darurat sampah tersebut, salah satunya dengan memberikan sarana dan prasarana pengolahan sampah organik dengan metode Karung Ember Kompos (Kang Empos) dan Magotisasi dan terus mengkampanyekan Gerakan Kang Pisman (Prasetyawati et al., 2019).

Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Salah satu

tugas utama kelurahan dalam bidang lingkungan adalah melakukan pengelolaan sampah secara efisien dan bertanggung jawab. Hal ini meliputi pengaturan sistem pengumpulan sampah, pemilahan sampah organik dan non-organik, serta pengelolaan limbah secara umum (Roos, 2021). Fungsi lainnya adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, mengadakan kegiatan pembersihan lingkungan, dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan (Yunita et al., 2020). Dengan demikian, kelurahan berperan penting dalam upaya pelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kesadaran di wilayah nya.

Sesuai dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 658.1/kep.2403-dlh/2023 Tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Sampah Kota Bandung. Maka dari itu, peran serta kelurahan yang ruang lingkupnya paling dekat dengan masyarakat menjadi sangat penting dalam penanganan darurat sampah tersebut (Haliya et al., 2020). Peran serta kelurahan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga dalam mengurangi sampah dari sumbernya dengan cara memisahkan, mengolah, dan memanfaatkannya menjadi bermanfaat.

Berdasarkan Laporan Monev Kang Pisman Kelurahan Pasirlayung Bulan Maret 2024 bahwa dari jumlah timbulan sampah per bulan yang dikirim ke TPS sekitar 5.465 kg, dari jumlah tersebut sampah yang bisa dikelola sebanyak kurang lebih 1.100 kg, menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kelurahan Pasirlayung belum berjalan optimal (Indah et al., 2022). Hal tersebut dapat menyebabkan masalah lingkungan yang semakin memburuk. Salah satu hambatannya adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk pengolahan sampah, seperti tidak adanya tempat pembuangan sementara yang terkelola dengan baik dan fasilitas daur ulang yang memadai (TPS 3R) (Dewi et al., 2020). Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah juga masih rendah, sehingga jumlah sampah yang masuk ke TPS dan TPA cenderung tidak terkelola dengan efisien.

Masyarakat Kelurahan Pasirlayung sebagian besar hanya membuang sampah tanpa adanya pemilahan antara organik dan anorganik. Hal tersebut dapat mengakibatkan dampak negatif pada lingkungan dan dapat mencemarkan tanah, udara dan air, terlebih lagi letak wilayah Kelurahan Pasirlayung yang berada di wilayah perbatasan bagian utara dengan Desa Cimenyan Kabupaten Bandung (Yuwita et al., 2022). Warga kabupaten sering membuang sampahnya ke Jalan Padasuka yang berada di wilayah Pasirlayung, sehingga di jalan tersebut sering terjadi penumpukan sampah di pagi hari, selain itu Jalan

Cimuncang yang berada di perbatasan wilayah juga sering terjadi penumpukan sampah akibat warga yang membuang sampah sembarangan. Hal tersebut disoroti dalam analisis laporan tanggal 2 Februari 2024 yang dilaporkan oleh protokol komunikasi pimpinan Kota Bandung. Tumpukan sampah di wilayah tersebut menjadi isu bersentimen negatif yang perlu segera ditindaklanjuti (penting) (Wiryo et al., 2020).

Kesadaran dan partisipasi aktif dari warga masyarakat yang tinggi merupakan faktor kunci dalam penanganan sampah, karena masalah sampah ini jika tidak dikelola dengan baik dapat mengancam kesehatan masyarakat, mencemari lingkungan dan merusak ekosistem secara keseluruhan (Asfahani et al., 2024). Tetapi juga diperlukan waktu yang cukup panjang dan komitmen tinggi untuk mengubah kebiasaan warga untuk sadar dan melaksanakan pengurangan dan pemanfaatan sampah mulai dari sumbernya (Musaddad et al., 2021).

Kolaborasi dari berbagai pihak dalam pengelolaan sampah di setiap lingkungan masyarakat akan mampu menyelesaikan masalah jangka pendek seperti mencemari lingkungan hingga masalah jangka panjang seperti mengancam kesehatan masyarakat (Putra & Ariesmayana, 2020). Dari penelitian awal dapat ditarik kesimpulan bahwa warga yang berpartisipasi aktif tiap bulannya dalam pemilahan sampah anorganik di Bank Sampah Unit selalu menurun dan jumlah sampah anorganik yang dipilah juga semakin menurun per bulannya, sedangkan potensi timbunan sampah yang ada terus meningkat. maka pengelolaan sampah di Kelurahan Pasirlayung menunjukkan belum dilaksanakan secara efektif.

Berbagai Program dan Kegiatan dari Kota Bandung yang diturunkan kepada Kewilayahan begitu Inovatif dalam mengatasi Persoalan Sampah sebut saja satu persatu yaitu, Program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan), Program Kang Empos (Karung, Ember, Kompos), Program Magotisasi, Program Loseda (Lodong sesa dapur), Program Bank Sampah Unit tiap RW, dll, tidak lain dan tidak bukan untuk menasar agar Pengelolaan sampah dari Sumber yaitu dari Unit terbawah RT-RW-Kelurahan dapat berjalan, maka berhasil dan gagalnya pengimplementasian pengelolaan sampah yang paling memiliki peran cukup penting adalah pemahaman aparat pelaksana di kewilayahan untuk menggerakkan sumber daya-sumber daya yang ada dengan baik.

## METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif melalui pendekatan

kualitatif. Penelitian deskriptif meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa saat ini. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Moleong, 2014).

Menurut Assyakurrohim et al. (2023) metode deskriptif adalah, "Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki".

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan filsafat positivism dan digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2018). Penelitian ini memerlukan gambaran dari suatu gejala yang ada dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan keadaan subjek penelitian. Data dari hasil penelitian ini adalah data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang menjelaskan hasil penelitian.

Adapun dalam penelitian yang dilakukan penulis jenis penelitian yang digunakan adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer didapatkan secara langsung dari lokasi penelitian, dalam hal ini data primer akan diperoleh melalui wawancara langsung ke Kantor Kelurahan Pasirlayung, dan Bank Sampah Unit RW di Kelurahan Pasirlayung. Data sekunder didapatkan dari mempelajari bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung (Studi Kasus: Kelurahan Pasirlayung).

Adapun penelitian kualitatif itu sendiri adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2019).

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung (Studi Kasus: Kelurahan Pasirlayung) dilaksanakan di Kelurahan Cisaranten Pasirlayung

Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, yang beralamat di Jl. Padasuka No. 146 Kelurahan Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui Kondisi Awal dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Pasirlayung mengacu pada keadaan awal dimana, masyarakat Kelurahan Pasirlayung sebagian besar hanya membuang sampah tanpa adanya pemilahan antara organik dan anorganik. Hal tersebut dapat mengakibatkan dampak negatif pada lingkungan dan dapat mencemarkan tanah, udara dan air, terlebih lagi letak wilayah Kelurahan Pasirlayung yang berada di wilayah perbatasan bagian utara dengan Desa Cimenyang Kabupaten Bandung. Warga kabupaten sering membuang sampahnya ke Jalan Padasuka yang berada di wilayah Pasirlayung, sehingga di jalan tersebut sering terjadi penumpukan sampah di pagi hari, selain itu Jalan Cimuncang yang berada di perbatasan wilayah juga sering terjadi penumpukan sampah akibat warga yang membuang sampah sembarangan.

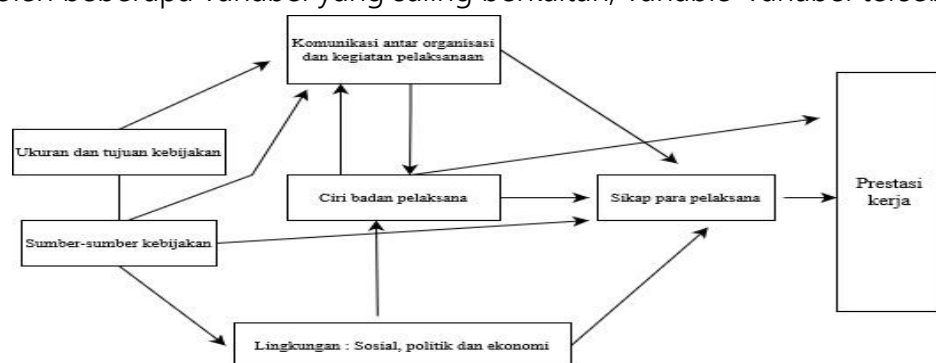
Hasil analisis dari penelitian tentang kondisi awal sangat diperlukan dalam Implementasi kebijakan dan sasaran serta tujuan dari kebijakan, dimana kebijakan yang dibuat akan berlandaskan pada kebutuhan yang sesuai dengan pemecahan masalah yang ada di lingkungan Kelurahan Pasirlayung. Suatu kebijakan dibuat dalam upaya menyelesaikan masalah dan dapat menjadi alternatif atau solusi atas masalah yang terjadi ditengah masyarakat (Arabi, 2022). Standar dan sasaran kebijakan harus dibuat dengan jelas. Dalam mengukur keberhasilan implementasi maka diperlukan untuk mengetahui tujuan dan standar keberhasilan dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah (Permendes, 2020). Standar keberhasilan dari Perda ini adalah adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mematuhi kebijakan ini dan adanya Kerjasama dari berbagai pihak, karena tidak hanya pemerintah saja yang bisa mengatasi persoalan pengelolaan sampah ini (Erlina et al., 2020). Tujuannya yaitu untuk mulai mengendalikan sampah dengan cara penanganan dan pengurangan sampah yang wajib dilakukan setiap orang. Dalam peraturan ini juga yang ditekankan yaitu pengelolaan dari sumber atau dari rumah.

Dimensi ukuran dasar dan tujuan kebijakan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Pasirlayung Kota Bandung berdasarkan wawancara, pengamatan dan studi kepustakaan serta melihat masalah yang mengemuka sampai saat

ini secara umum menunjukkan bahwa dimensi-dimensi ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan belum berjalan dengan baik serta belum menunjukkan hasil yang optimal sekalipun harus diakui telah terjadi perubahan-perubahan dalam pengelolaan sampah. Kemudian dalam aspek Sumber daya kebijakan (Fatimah, 2021). Sumber daya merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan suatu kebijakan, dimana ketersediaan sumber daya yang memadai sangat mempengaruhi suatu kebijakan untuk mencapai keberhasilan (Gea et al., 2022).

Sumber daya yang dianalisis oleh peneliti adalah sumberdaya manusia, finansial dan fasilitas yang dimiliki untuk melaksanakan Impelentasi Kebijakan Pengelolaan sampah di Kelurahan Pasirlayung Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara, dapat dijelaskan bahwa sumberdaya mausia yang dikerahkan dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Pasirlayung cukup memadai. Dari segi kuantitas, namun dari segi kualitas sumber daya manusia tidak cukup. kemudian dalam hal Sumber Daya Finansial Kelurahan tidak memiliki sumber daya finansial seperti layaknya desa mandiri (Wiani et al., 2018). Maka oleh karena itu adanya dukungan finansial yang memadai akan memungkinkan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kelurahan Pasirlayung efektif dan berkontribusi pada daya dukung partisipasi masyarakat yang lebih maksimal. Sumber daya fasilitas sudah cukup memadai. Kemudian dalam hal Karakteristik organisasi pelaksana, terjadi pasang surut kinerjanya, dan masih memiliki tantangan dalam hal karakteristik pelaksana.

Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik (Korain et al., 2019). Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:



Gambar 1 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn  
 Sumber : Model Implementasi Kebijakan dalam *Riant Nugroho (2003; 168)*

Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn merumuskan 6 aspek-aspek yang meliputi:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan, Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan.(Arini, 2023).
2. Sumber Daya Kebijakan, Sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu (Ariadi, 2019). Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
3. Karakteristik Organisasi Pelaksana, Pada agen pelaksana, fokus perhatiannya mencakup organisasi formal dan informal yang akan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini sangat penting karena efektivitas implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh sifat baik dan kesesuaian organisasi pelaksana.
4. Komunikasi antar organisasi terkait kegiatan pelaksanaan, semakin baik pengembangan saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi peluang perintah tersebut diteruskan secara tepat dan benar. Dalam komunikasi dibutuhkan perintah yang akurat dan jelas. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka akan sulit untuk bisa dicapai.
5. Disposisi atau sikap pelaksana, menurut Van Meter dan Van horn dalam RS. Sipayung (2019): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan.
6. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi, Terakhir, perhatian harus diberikan pada sejauh mana kontribusi lingkungan eksternal terhadap keberhasilan kebijakan publik. Kombinasi faktor lingkungan eksternal juga mempengaruhi hasil implementasi kebijakan.

Konsistensi dan komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan sangat penting untuk memudahkan pelaksanaannya, untuk dapat melakukan realisasi sasaran kebijakan tentunya memerlukan pemahaman bersama antar semua unsur implementor kebijakan, kenyataannya menunjukkan bahwa antara pimpinan dan staf pelaksana terkadang terjadi

perbedaan persepsi, pola pikir dan cara pandang yang berbeda dalam memahami pencapaian tujuan kebijakan (Rusmini, 2022). Sedangkan dalam Komunikasi antar organisasi terkait kegiatan pelaksanaan dari keterangan wawancara yang penulis lakukan, dari aspek komunikasi dari transmisi, kejelasan dan juga konsistensi belum memenuhi Komunikasi yang baik untuk mewujudkan suatu Implementasi Kebijakan. Hal ini harus segera diperbaiki oleh Pemerintah Kota Bandung melalui DLHK agar pembinaan dan sosialisasi kebawah dalam hal ini kewilayahan sangat penting untuk mencapai tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah, komunikasi antar organisasi pelaksana sangat penting karena apabila dilaksanakan komunikasi secara langsung, terjadwal dan juga terarah akan menghasilkan titik temu hambatan pengelolaan sampah di Kota Bandung (Hesti, 2020). Sementara dalam aspek Disposisi Implementor, Pelaksana sudah memiliki sikap *acceptance* atau menerima kebijakan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah sudah cukup baik, karena para Implementor menyadari bahwa mentaati Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 tahun 2018 tentang Pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan (Ristanti, 2015).

Sementara dalam aspek Kondisi sosial dalam Implementasi kebijakan pengelolaan sampah itu, yaitu kurangnya keterlibatan masyarakat, keterbatasan komunikasi juga koordinasi karena kan kita di Kelurahan jumlah SDM ASN nya sedikit, rasa tanggung jawab masyarakat terhadap cinta lingkungan juga masih terbilang minim, Kaitan dengan kondisi politik ini, kaitan dengan peraturan, Pemerintah Kota Bandung terus mengeluarkan sejumlah peraturan-perturan diantaranya Instruksi Wali Kota Bandung Nomor 004-DLH/2024 Tahun 2024 tanggal 01 Agustus 2024 tentang Penerapan Kebiasaan Baru Pengelolaan Sampah di Perkantoran Pemerintah Kota Bandung yang memuat tupoksi Kelurahan yang lebih jelas dan rinci, sementara Kondisi Ekonomi pengelolaan sampah di Kota Bandung membutuhkan biaya besar untuk berbagai kegiatan penanganan sampah. Biaya operasional pengelolaan sampah sendiri sekitar 170 miliar per tahunnya. Adapun yang menjadi Faktor Pendukung dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Pasirlayung adalah adanya kesadaran untuk menerima kebijakan walupun partisipasi dalam olah dan pilah sampah harus terus diingatkan dan disosialisasikan oleh para anggota Bank Sampah dan Implementor terkait, sementara yang menjadi Faktor penghambatnya yakni adalah Komunikasi antar organisasi dalam hal ini dari pihak DLHK kepada Kelurahan masih minim koordinasi, belum terjadwal dengan baik, hanya melaksanakan monev yang berbentuk laporan saja, terkadang tindak lanjut harus

dilakukan dengan terus-menerus guna komitmen terhadap tujuan kebijakan yang dari awal sudah disusun dapat berjalan dengan optimal.

## SIMPULAN

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Pasirlayung Kota Bandung belum berjalan optimal berdasarkan faktor-faktor Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn, dari hasil penelitian yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakannya adalah dari mulai tujuan kebijakan yang tertuang dalam Perda No. 9 Tahun 2018 yang tidak semua masyarakat menjalankan pilah olah sampah dari rumah, masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan di Jalan-jalan wilayah Kelurahan Pasirlayung, Partisipasi masyarakat sangat minim untuk mengikuti Bank Sampah, kemudian Implementor yang menjadi agen perubahan pengelolaan sampah di wilayah belum sepenuhnya menyadari akan tugasnya untuk sosialisasi kepada warga, keterbatasan sumber daya finansial dimana anggaran yang dilimpahkan dari Pemerintah Kota Bandung masih sangat minim, kemudian komunikasi antar agen pelaksana masih menemui kendala, dalam hal ini Komunikasi antar DLHK dan Kelurahan belum secara rutin dan terjadwal.

Adapun yang menjadi saran penulis adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan Komunikasi antar Organisasi Pelaksana dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung untuk melakukan pemetaan *stakeholder* pengelolaan sampah kewilayahan dengan mengadakan Focuss Grup Discussion (FGD) yang rutin dan terjadwal agar mengetahui kendala-kendala pengelolaan sampah di sumber secara langsung dengan menghadirkan perwakilan petugas-petugas lapangan yang berkecimpung langsung dilapangan. 2) Meningkatkan Komitmen Kelurahan Pasirlayung yang bebas sampah melalui rencana aksi bersama yang menghadirkan seluruh elemen masyarakat, RT/RW, Perwakilan Sekolah dan Swasta, serta Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, D. P., Al Hasani, A. M., Amalia, A. F., & Putri, R. M. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa Rowo Tengah dalam Mengembangkan Ekonomi Melalui Program Pengolahan Sampah Menjadi Pupuk Kompos. *The 4th International Conference on University Community Engagement (ICON-UCE 2022)*, 4, 199–203.
- Arabi, A. (2022). Situasi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Perlis Di Kecamatan Berandan

- Barat Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan ...*, 2, 239–248.
- Ariadi, A. (2019). Bantu Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135–147.
- Arini, I. (2023). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Besar Kota Malang (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja)*.
- Asfahani, A., Yuniarti, E., Husnita, L., Pahmi, P., & Jamin, N. S. (2024). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Kesehatan Mental Melalui Edukasi Pendidikan Sosial. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 3633–3639.
- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9.
- Dewi, I. nurani, Royani, I., Sumarjan, S., & Jannah, H. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Skala Rumah Tangga Menggunakan Metode Komposting. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 2(1), 12–18. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v2i1.172>
- Erlina, A., Riyanto, D. R., & HUM, M. (2020). *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Madiun (Studi Pada Dinas Perdagangan Dan Satpol Pp Kota Madiun)*. Universitas Brawijaya.
- Fatimah, A. S. (2021). Pengembangan Kapasitas Pengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Cilumba Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya. *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik)*, 2(1).
- Firdayanti, Y., & Oktafani, F. (2023). Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Iphone 12 Di Kota Bandung. *RELASI: JURNAL EKONOMI*, 19(1), 1–11.
- Gea, I. V., Saleh, M., & Suharto, R. B. (2022). Peranan corporate social responsibility (CSR) terhadap tingkat pembangunan desa. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 18(3), 551–560. <https://doi.org/10.29264/jinv.v18i3.11545>
- Haliya, H. Z., Setyaningsih, W., & Winarto, Y. (2020). Konsep Zero Waste Pada Desain Environmental Learning Park Di Batu, Jawa Timur. *Januari*, 3(1), 57–68.
- Hesti, Y. (2020). Upaya Penanganan Limbah B3 Dan Sampah Rumah Tangga Dalam Mengatasi Pandemi Corona Sesuai Dengan Surat Edaran No. Se. 2/Menlhk/Pslb3/Plb. 3/3/2020tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3)

- Dan Sampah Rumah Tangga Dari Penanganan Corona Virus Disease. *J Pro Justitia*.
- Indah, D., Kamil, I., Yunaningsih, A., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Langlangbuana, U., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Langlangbuana, U. (2022). *Pelatihan manajemen komunikasi aparat desa kecamatan ibun kabupaten bandung di masa pandemi 1,2*. 4(1), 45–51.
- Kamil, I. (2018). Peran Komunikasi Pemerintahan dalam Penanganan Lingkungan Kumuh. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 11(1). <https://doi.org/10.29313/mediator.v11i1.3322>
- Korain, F. X., Kaunang, M., & Egetan, M. (2019). Implementasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus bidang Pendidikan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi*, 1(086), 94–109.
- Mardwita, Yusmartini, E. S., Melani, A., Atikah, & Ariani, D. (2019). Pembuatan Kompos Dari Sampah Organik Menjadi Pupuk Cair dan Pupuk Padat menggunakan Komposter. *Suluh Abdi: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32502/sa.v1i2.2295>
- Moleong, L. J. (2014). Metode penelitian kualitatif edisi revisi. *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*.
- Musaddad, A., Jannah, M., Hotimah, H., & Ningsih, L. (2021). Optimalisasi Program Lingkungan Bersih Melalui Pembuatan Tempat Sampah. *Nusantara Journal of Community Engagement*, 2(1), 87–94.
- Permendes. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Kemendesa PDTT*, 73.
- Prasetyawati, M., Casban, Nelfiyanti, & Kosasih. (2019). Pelatihan Pembuatan Pupuk Cair Dari Bahan Sampah Organik di RPTRA Kelurahan Penggilingan. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*.
- Putra, Y., & Ariesmayana, A. (2020). Efektifitas penguraian sampah organik menggunakan Maggot (BSF) di pasar Rau Trade Center. *Jurnal Lingkungan Dan Sumberdaya Alam (JURNALIS)*, 3(1), 11–24.
- Ristanti, Y. D. (2015). Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Riset Akutansi Keuangan*, 2(2), 115–122.
- Roos, D. O. (2021). David. O. Roos, Sampah dan Masalah Sosial Kemasyarakatan Di Ahuru Air Besar Kota Ambon. *HIPOTESA-Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 15(1), 57–69.
- Rusmini, A. M. (2022). Urgensi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Lanjut Usia (Lansia) Di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Kebijakan*

*Pembangunan*, 17(2), 199–208.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *ke-26*.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.

Wiani, A., Ahman, E., & Machmud, A. (2018). Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Berwirausaha Peserta Didik Smk Di Kabupaten Subang. *Jurnal MANAJERIAL*, 17(2), 227. <https://doi.org/10.17509/manajerial.v17i2.11843>

Wiryo, B., Muliatiningsih, M., & Dewi, E. S. (2020). Pengelolaan Sampah Organik Dilingkungan Bebidas. *JADM: Jurnal Agro Dedikasi Masyarakat*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jadm.v1i1.2780>

Yunita, L., Simorangkir, W., & Saputra, S. (2020). Penguatan Ekonomi Keluarga Berbasis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dengan Metode Keranjang Takakura Pada Ibu Rumah Tangga Kelurahan Glugur Darat I Kota Medan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 1(1), 32–39.

Yuwita, N., Hasyim, M., & Asfahani, A. (2022). Pendampingan Budidaya Maggot Lalat Black Soldier Fly Sebagai Pengembangan Potensi Lokal Masyarakat. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 3(2), 393–404.